

BAB II

DISKRIMINASI TIONGKOK DAN PERJUANGAN DIASPORA ETNIS UYGHUR DALAM UPAYA KEBEBASAN TURKISTAN TIMUR

Sejak berkuasanya Partai Komunis Tiongkok pada 1949, etnis Uyghur di Turkistan Timur hidup dalam penderitaan karena tindakan diskriminatif Tiongkok terhadap etnis minoritas. Sejak saat itu, Turkistan Timur ditetapkan menjadi salah satu provinsi di Tiongkok dengan nama Xinjiang. Tindakan diskriminatif Tiongkok nampak di seluruh aspek kehidupan etnis Uyghur, mulai dari ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini dilakukan Tiongkok untuk dapat mencengkram wilayah yang merupakan tanah asal etnis Uyghur karena kekayaan alamnya yang melimpah. Selain berusaha menguasai wilayahnya, Tiongkok juga berusaha menghapuskan nilai-nilai Islam yang diyakini oleh etnis Uyghur secara represif.

Tiongkok mendirikan kamp-kamp bagi etnis Uyghur guna mengupayakan indoktrinasi politik. Sejak saat itu, banyak etnis Uyghur yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp tersebut tanpa alasan dan batas waktu yang jelas. Pada tahun 2014, Tiongkok secara resmi meluncurkan *Strike Hard Campaign* untuk meningkatkan pengamanan di Xinjiang. Berbagai kebijakan yang diambil Tiongkok dinilai merugikan etnis Uyghur. Kondisi seperti ini membuat diaspora etnis Uyghur tidak tinggal diam. Dari seluruh penjuru dunia, diaspora etnis Uyghur berupaya untuk menyatukan dukungan dalam rangka memperjuangkan kebebasan bangsanya dari diskriminasi yang dilakukan Tiongkok. Perjuangan mereka kemudian diimplementasikan dalam *World Uyghur Congress* (WUC).

Secara sederhana, bab ini dibagi menjadi tiga subbab. Subbab pertama memaparkan mengenai kronologi dari Turkistan Timur menjadi Xinjiang yang mana menjadi titik awal diskriminasi yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Subbab kedua membahas *Strike Hard Campaign* yang mana merupakan babak baru diskriminasi yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Sedangkan subbab ketiga menjelaskan bagaimana perjuangan diaspora etnis Uyghur dalam memperjuangkan bangsanya dari luar tanah air.

2.1 *From East Turkistan to Xinjiang: Sejarah Diskriminasi Tiongkok terhadap Etnis Uyghur*

Sebelum dikuasai oleh Tiongkok dan ditetapkan menjadi salah satu provinsinya, Turkistan Timur merupakan suatu wilayah seluas 1,6 juta km² yang didiami oleh etnis Uyghur dan beberapa etnis lain yang berasal dari Asia Tengah, seperti Kazak, Kyrgy, Tatar, Uzbek, dan Tajik (International Uyghur Human Rights and Democracy Foundation, 2005). Seperti dapat dilihat pada gambar 2.1, Turkistan Timur terletak di jantung Asia Tengah. Di bagian Utara, Turkistan Timur berbatasan dengan Rusia. Di bagian Timur, Turkistan Timur berbatasan dengan Tiongkok. Di bagian Selatan, Turkistan Timur berbatasan dengan Pakistan, India, dan Tibet. Sedangkan di bagian Barat, Turkistan Timur berbatasan dengan Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan (Unrepresented Nations and Peoples Organization, 2015). Beberapa kota penting di Turkistan Timur, antara lain Urumqi yang sempat menjadi ibu kota Turkistan Timur dan Kasghar yang merupakan pusat perdagangan (Britannica, 2020).

Gambar 2.1 Peta Turkistan Timur



Sumber: *East Turkistan National Awakening Movement*, 'East Turkistan at a Glance'

Nama Turkistan sendiri berasal dari bahasa Persia yang berarti tanah milik bangsa Turki. Turkistan Barat secara bertahap ditaklukkan oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1865. Setelah pembentukan Uni Soviet pada tahun 1924, Turkistan Barat dibagi menjadi lima republik, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan dan Tajikistan. Sedangkan Turkistan Timur berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Manchu pada tahun 1876. Sejak saat itulah pergolakan mulai terjadi di antara etnis Uyghur dan bangsa Tiongkok terkait kepemilikan wilayah Turkistan Timur (Unrepresented Nations and Peoples Organization, 2015).

Sebagai etnis pribumi, etnis Uyghur telah mendiami wilayah Turkistan Timur selama lebih dari 4.000 tahun dan berkembang menjadi etnis mayoritas di wilayah tersebut. Etnis Uyghur berkomunikasi menggunakan bahasa dan tulisannya sendiri yang masuk dalam kelompok *Turkish* dari filum *Altaic*. Dalam bahasa Turki, Uyghur memiliki arti sekutu (Travel China Guide). Pada tahun 934 M, etnis Uyghur mulai memeluk Islam. Sejak saat itu, Turkistan Timur berkembang menjadi salah satu pusat peradaban Islam terbesar di Asia Tengah. Kemajuan peradaban Islam Turkistan Timur salah satunya ditandai dengan kemunculan sejumlah cendekiawan yang berasal dari etnis Uyghur, antara lain Yusuf Has Hajip dengan bukunya *The Knowledge for Happiness* (1069–1070) dan Mahmud Kashgari yang merupakan penulis kamus bahasa Turki pertama. Nilai-nilai Islam juga nampak dalam aspek kebudayaan etnis Uyghur. Salah satu kebudayaan etnis Uyghur yang paling populer adalah seni musik Muqam yang pada tahun 2005 ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya UNESCO (International Uyghur Human Rights and Democracy Foundation, 2005). Hal ini menunjukkan betapa kuatnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan etnis Uyghur.

Pada tahun 1863, Republik Islam Turkistan Timur pertama kali mendeklarasikan kemerdekaannya di bawah kepemimpinan Yakup Khan dengan mendapat pengakuan dari Ottoman, Inggris, dan Rusia. Namun demikian, pada tahun 1876, Kekaisaran Manchu berhasil menduduki wilayah ini dan menamakannya Xinjiang pada tahun 1884. Dalam bahasa Mandarin, Xinjiang berarti wilayah baru. Adanya *mainstream* gerakan nasionalisme di Timur Tengah pada awal abad ke-20 turut mengilhami gerakan revolusi untuk memerdekakan Turkistan Timur. Pada tahun 1933, Turkistan Timur berhasil merdeka dengan

Khasgar sebagai ibu kota. Hanya berselang empat tahun, Tiongkok berhasil menjatuhkan Khasgar pada tahun 1937 dengan bantuan senjata serta pasukan dari Uni Soviet. Dimulainya Perang Dunia II membuat Uni Soviet menarik pasukannya dari Turkistan Timur. Hal ini dimanfaatkan oleh para pejuang etnis Uyghur untuk kembali melakukan perlawanan. Alhasil, kemerdekaan Turkistan Timur berhasil direbut kembali pada tahun 1944 (Duman, 2017).

Kebebasan Turkistan Timur sebagai sebuah entitas berdaulat harus benar-benar berakhir pasca kemenangan Partai Komunis Tiongkok atas Kelompok Nasionalis Tiongkok pada tahun 1949. Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, perlawanan etnis Uyghur berhasil dihentikan dan wilayah Turkistan Timur diklaim menjadi salah satu provinsi di Tiongkok dengan nama resmi *Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR) (Duman, 2017). Meski dinamakan demikian, janji akan otonomi wilayah tidak pernah ditepati Tiongkok. Alih-alih menepati janji akan otonomi wilayah, Tiongkok justru menunjukkan kontrol penuh atas wilayah Turkistan Timur yang diwujudkan dengan serangkaian tindakan diskriminatif yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Perubahan dari Turkistan Timur menjadi Xinjiang inilah yang menandai penderitaan etnis Uyghur.

Bagi Tiongkok, Xinjiang memiliki arti yang sangat penting karena kekayaan alamnya yang melimpah. Xinjiang merupakan wilayah yang kaya akan kandungan bahan tambang dan potensi agrikultur yang besar. Dari aspek pertambangan, Xinjiang merupakan wilayah penghasil tiga komoditas utama tambang terbesar bagi Tiongkok, yakni batu bara (38% dari total pasokan batu bara Tiongkok), minyak bumi (21,5% dari total pasokan minyak bumi Tiongkok), serta gas alam (23,3% dari total pasokan gas alam Tiongkok) (Duan, Wei, Zeng, & Ju, 2016). Sedangkan dari aspek agrikultur, Xinjiang menyumbang 83% dari total pasokan kapas Tiongkok, menjadikan Tiongkok sebagai negara pengekspor kapas terbesar di dunia. Selain itu, Xinjiang juga menyuplai kebutuhan tomat bagi sejumlah perusahaan saus tomat besar di dunia (Caster, 2019). Nilai material yang amat besar ini membuat Tiongkok bertekad kuat menguasai Xinjiang. Hal ini berkaitan dengan ambisi Mao Zedong untuk menjadikan Tiongkok negara maju setelah mengalami keterpurukan akibat perang berkepanjangan.

Upaya pertama yang dilakukan Tiongkok untuk menguasai Xinjiang dan meminimalisir kekuasaan etnis Uyghur adalah dengan melakukan program migrasi etnis Han – etnis mayoritas di Tiongkok – ke wilayah Xinjiang dalam skala besar. Sejak dimulai pada tahun 1949, populasi etnis Han di Xinjiang mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni dari hanya 6,2% berkembang pesat hingga mencapai 40% dari total penduduk Xinjiang pada 2019 (Hayes, 2019). Dengan semakin banyaknya etnis Han yang mendiami Xinjiang, Tiongkok dapat lebih mudah menguasai kekayaan alam yang ada di Xinjiang. Selain itu, perkembangan pesat etnis Han juga dimanfaatkan Tiongkok untuk menggeser kekuasaan etnis Uyghur yang pada awalnya menguasai Xinjiang.

Selain program migrasi besar-besaran etnis Han ke Xinjiang, pada tahun 1954, dibentuk sebuah organisasi bernama *Xinjiang Production and Construction Corps* (XPCC) atau dalam bahasa Mandarin disebut dengan *Bingtuan*. XPCC dibentuk oleh Wang Zhen atas perintah langsung dari Mao Zedong. XPCC dibentuk untuk mengupayakan pembangunan di Xinjiang, khususnya pembangunan ekonomi. Dalam 50 tahun kiprahnya, XPCC telah berhasil membangun kota – lengkap dengan infrastrukturnya – untuk menunjang aktivitas ekonomi, perkebunan, peternakan, dan industri. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai yang direncanakan, XPCC turut memegang kendali atas sistem pendidikan – termasuk Universitas Shihezi dan Universitas Tarim – serta mendirikan kantor media massa, *Bingtuan Daily* (The Economist, 2020).

Sebagai sebuah organisasi perwujudan sistem *tuntian* – sistem tradisional Tiongkok pada masa Dinasti Tang dan Qing – XPCC juga dilengkapi dengan unit militer (Rossabi, 2005). Sistem *tuntian* dilakukan dengan menempatkan unit militer di daerah perbatasan. Adapun unit militer yang dikerahkan dalam XPCC adalah gabungan dari tentara komunis yang tergabung dalam *First Field Army* dan tentara anti-komunis yang sebelumnya didemobilisasi karena menjadi pengikut Kuomintang (O'Neill, 2008). Meskipun berhasil mewujudkan pembangunan Xinjiang, XPCC tidak mewakili aspirasi etnis Uyghur. Dari keseluruhan anggota XPCC, hanya sebesar 6% anggota yang berasal dari etnis Uyghur. Sedangkan hampir 90% anggota XPCC berasal dari etnis Han (Olesen, 2014). Hal ini

menunjukkan bagaimana diskriminasi terhadap etnis Uyghur telah berlaku sejak ditetapkannya Turkistan Timur menjadi Xinjiang.

Tak cukup dalam keanggotaan XPCC, dominasi etnis Han juga nampak dalam segala aspek kehidupan etnis Uyghur. Lambat laun, etnis Han muncul sebagai pengendali seluruh fungsi dan aktivitas politik utama di Xinjiang. Dengan dukungan pemerintah Tiongkok, etnis Han menciptakan keadaan yang mana mengisolasi dan membatasi segala tindakan etnis Uyghur. Etnis Uyghur mendapat perlakuan yang berbeda di sejumlah tempat pelayanan publik. Selain dalam bidang politik, etnis Han juga menguasai perekonomian Xinjiang. Sektor-sektor perekonomian utama diambil alih dan dikuasai etnis Han. Kualitas sumber daya manusia dan penguasaan bahasa Mandarin yang lebih baik membuat etnis Han lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Alhasil, etnis Uyghur mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan (Joniak-Lüthi, 2013). Dalam perkembangannya, etnis Uyghur terdorong untuk meninggalkan Xinjiang untuk mendapatkan pekerjaan di belahan lain Tiongkok. Namun demikian, usaha ini hanya menyebabkan etnis Uyghur semakin terpinggirkan karena pada umumnya pekerjaan yang mereka dapatkan hanya menjadi budak dan pekerjaan kasar lainnya yang tidak jauh lebih baik (Karisma, 2006).

Selain karena kepentingan untuk menguasai kekayaan alam Xinjiang, marjinalisasi yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uyghur juga didorong karena sentimen yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam yang dianut oleh etnis Uyghur. Ideologi Komunis yang berseberangan dengan nilai-nilai agama menjadi dasar utama dari upaya Tiongkok dalam memberangus nilai-nilai Islam yang dianut oleh etnis Uyghur. Seperti yang diketahui, pemerintah Tiongkok selalu berupaya mengintervensi kehidupan beragama rakyatnya. Sejak dimulainya Revolusi Kebudayaan yang dicanangkan Mao Zedong pada tahun 1966, pemerintah Tiongkok mulai gencar memberangus nilai-nilai agama yang diyakini oleh rakyat Tiongkok, seperti Budha, Tao, dan bahkan budaya-budaya ortodoks Tiongkok yang telah ada sejak ribuan tahun lamanya. Hal ini tentunya termasuk nilai-nilai Islam yang dianut etnis Uyghur. Gelombang Revolusi Kebudayaan ini sendiri memakan korban jutaan jiwa akibat tindakan represif yang digunakan Tiongkok dalam upaya “penertiban” (Ganenedra, 2013).

Pemberangusan nilai-nilai Islam dilakukan pemerintah Tiongkok dengan melarang etnis Uyghur melakukan ritual-ritual keagamaan. Etnis Uyghur dilarang untuk melakukan salat dan puasa. Otoritas setempat bahkan membagikan makanan dan minuman ke rumah-rumah penduduk pada saat bulan Ramadan dan memaksa umat Muslim untuk tidak berpuasa. Etnis Uyghur juga dilarang untuk memasuki Masjid. Masjid-masjid dijaga ketat oleh otoritas setempat. Ribuan Masjid bahkan dihancurkan melalui program *Mosque Rectification Program*. Menurut *Radio Free Asia* (RFA) pada tahun 2016, Tiongkok telah menghancurkan lebih dari 5.000 Masjid hanya dalam kurun waktu tiga bulan. Kepala *Ethnic and Religious Affairs Committee* kota Khasgar menuturkan kepada RFA, bahwa 70% dari keseluruhan Masjid dihancurkan dengan alasan sudah terlalu banyak Masjid yang ada di kota tersebut (Hoshur, 2016). Masjid yang dihancurkan termasuk masjid-masjid yang masuk dalam daftar *Uyghur Cultural Heritage*, seperti Masjid Keriya Id Kah dan Masjid Agung Kargilik. Sebagai umat Muslim, Masjid memiliki arti penting bagi etnis Uyghur. Menurut Rahil Dawut – seorang cendekiawan yang berasal dari etnis Uyghur – dalam sebuah wawancara, penghancuran Masjid sama artinya dengan menghapus sejarah, budaya, dan spiritualitas etnis Uyghur (Kuo, 2019).

Selain penghancuran Masjid, Tiongkok juga melakukan penangkapan terhadap para pemuka agama, termasuk Imam serta orang yang bertugas menjaga dan membersihkan Masjid (Seituly, 2018). Mereka dipenjarakan tanpa ada tuduhan yang jelas dan tanpa melalui proses peradilan yang semestinya. Menurut kesaksian dari mantan tahanan, Erbon Ergali, para pemuka agama dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara dan mendapat siksaan selama berada di dalam penjara (Ergali, 2018). Tak hanya dipenjarakan, terdapat sejumlah kasus kematian pemuka agama yang terjadi akibat tindak kekerasan. Pada 29 Januari 2018, *Uyghur Human Rights Project* menerima konfirmasi dari kerabat Muhammad Salih Hajim tentang kematian Hajim di sebuah penjara di Xinjiang. Hajim merupakan Imam terkemuka dari etnis Uyghur yang telah berusia 82 tahun. Keadaan pasti dari kematiannya tidak diketahui, tetapi Hajim ditahan hingga akhir tahun 2017 bersama dengan putrinya, Nezire Muhammad Salih dan kerabat lainnya (Uyghur Human Rights Project, 2018). Selain Hajim, Abdulehed Mehsum, seorang ahli agama terkemuka berusia 88 tahun, dilaporkan meninggal ketika ditahan di penjara di kota Hotan pada bulan

November 2017. Kematian Mehsum baru diketahui pada 27 Mei 2018 (World Uyghur Congress, 2018).

Selain melanggar kebebasan beragama, Tiongkok juga melanggar kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat di depan umum. Selain penghancuran masjid dan penangkapan para pemuka agama, keberadaan sekolah Islam dikontrol secara ketat oleh pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok berdalih hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan negaranya (Ganenedra, 2013). Bagi Tiongkok, nilai-nilai Islam dapat mengancam keamanan dan kestabilan negaranya. Untuk itu, cara-cara tersebut ditempuh untuk dapat menghentikan penyebaran nilai-nilai Islam lebih meluas.

Tiongkok dinilai keras dalam memberikan kebebasan bagi etnis minoritas dan terlalu fokus untuk menciptakan suatu homogenitas bagi rakyatnya. Hal inilah yang kemudian memperlebar jurang kesenjangan di antara etnis Uyghur dan etnis lain. Berbagai tindakan Tiongkok yang represif dan diskriminatif memunculkan kecemburuan antaretnis.

“The pressure of China’s monoculturalist policy has reframed the psychologically healthy ethnic sentiment of being distinct (that of being “different than Hans”) into a politicized anti-majority-feeling (being “anti-Han”)” (Dwyer, 2005:58)

Salah satu kebijakan yang dianggap memperkeruh hubungan antar etnis adalah kebijakan mengenai bahasa dan agama. Meskipun Tiongkok dalam UU Kewarganegaraan tahun 1984 dan UU Otonomi Daerah tahun 1984 telah memberi tempat bagi hak linguistik terhadap penggunaan bahasa etnis minoritas di Tiongkok, namun pelaksanaannya masih terbilang lemah. Pada akhirnya, mengutip ungkapan Dwyer:

“Minority nationalities such as the Uyghurs who see no future in participating in China’s society may eventually decide to opt out”. (Dwyer, 2005:65)

Memasuki dekade 1990-an, sejumlah perlawanan dilakukan oleh etnis Uyghur menanggapi ketidakadilan Tiongkok. Pada bulan April 1990, lebih dari 1.000 demonstran turun ke jalan menanggapi pelarangan pendirian Masjid di kota

Akto. Protes berakhir ricuh dengan memakan setidaknya 60 korban tewas. Pada bulan April 1990, kerusuhan juga terjadi di kota Baren dengan memakan setidaknya 1.600 korban tewas. Pada bulan Februari 1997, demonstran kembali turun ke jalan menuntut pembebasan 30 pemuka agama yang ditangkap menjelang bulan Ramadan di kota Ghulja. Insiden ini memakan korban jiwa sebanyak 167 orang. Otoritas Tiongkok bahkan melakukan eksekusi terbuka terhadap tujuh etnis Uyghur yang diduga menjadi dalang dari aksi protes di kota Ghulja. Aksi ini mengundang reaksi keras dari etnis Uyghur yang menyaksikan kejadian tersebut. Baku tembak pun tak terhindarkan, sehingga menewaskan sembilan korban jiwa (Global Security).

Pada tahun 1998, sejumlah tokoh pergerakan etnis Uyghur berkumpul di Istanbul untuk membentuk suatu organisasi yang memayungi seluruh gerakan perjuangan etnis Uyghur yang sedang berlangsung. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah organisasi bernama *East Turkestan National Centre* (Immigration and Refugee Board of Canada, 2020). Tiongkok menyadari ancaman yang dapat dihasilkan dari pembentukan organisasi tersebut. Tiongkok berasumsi bahwa etnis Uyghur berupaya untuk memerdekakan Xinjiang pada tahun 2000. Untuk itu, Tiongkok mengkondisikan agar organisasi tersebut tidak memperoleh simpati dan dukungan komunitas internasional yang lebih luas dengan menyematkan label separatisme pada gerakan etnis Uyghur tersebut.

Serangan terorisme yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001 atau dikenal dengan peristiwa 9/11 berdampak pula terhadap perlakuan Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Ketika pandangan terhadap umat Muslim di dunia sedang memburuk dan *islamophobia* tengah merebak di seluruh dunia, Tiongkok memanfaatkan momentum ini untuk semakin menjatuhkan citra etnis Uyghur. Pada tahun 2002, Tiongkok mengeluarkan pernyataan mengenai keterlibatan etnis Uyghur dalam kelompok terorisme internasional (Davis, 2008). Propaganda Tiongkok terkait isu separatisme etnis Uyghur yang kemudian diasosiasikan dengan terorisme terbilang berhasil dalam mencegah isu diskriminasi dan kejahatan manusia yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uyghur membesar dan menarik simpati serta dukungan komunitas internasional.

2.2 *Strike Hard Campaign*: Babak Baru Diskriminasi Tiongkok terhadap Etnis Uyghur

Pada bulan Mei 2014, Tiongkok secara resmi meluncurkan *Strike Hard Campaign against Violent Terrorism* bagi etnis Uyghur di Xinjiang. Kampanye ini diinisiasi oleh Zhang Chunxian, Ketua Partai Komunis yang dilantik pada bulan April 2010. Zhang melanjutkan kiprah pendahulunya, Wang Lequan, yang dinilai bertanggung jawab terhadap serangkaian tindakan diskriminatif terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Pada tahun 2011, Zhang mengusulkan program modernisasi kebudayaan di Xinjiang yang sebenarnya merupakan upaya menghapuskan nilai-nilai Islam yang dianut oleh etnis Uyghur. Zhang bahkan menggunakan istilah *de-extremification* untuk menggambarkan kampanye ini. Sejak saat itu, di bawah administrasi Presiden Xi Jinping, Tiongkok meningkatkan pengamanan terhadap etnis Uyghur di Xinjiang (Wines, 2009).

Gambar 2.2 Sebuah mural di Xinjiang yang memiliki arti “stabilitas adalah berkah, instabilitas adalah malapetaka”



Sumber: *Human Rights Watch*, ‘China: Children Caught in Xinjiang Crackdown’

Pada dasarnya, munculnya gagasan *Strike Hard Campaign* dipicu oleh beberapa hal, antara lain terus menegangnya hubungan antara etnis Uyghur dan etnis Han, partisipasi sejumlah etnis Uyghur dalam perang di Suriah, serta dugaan

keterlibatan etnis Uyghur dalam beberapa aksi terorisme. Untuk itu, memasuki tahun 2014, otoritas menanggapi kekhawatiran tersebut dengan meluncurkan *Strike Hard Campaign*. Kampanye dilakukan dengan memaksimalkan kontrol terhadap etnis Uyghur, termasuk mengawasi telepon genggam, komputer, dan alat komunikasi lain milik etnis Uyghur (Radio Free Asia, 2014). Tiongkok juga memberlakukan serangkaian peraturan baru bagi etnis Uyghur, termasuk larangan untuk memanjangkan jenggot bagi pria dan mengenakan hijab bagi wanita (Roberts, 2018).

Dalam meningkatkan pengamanan terhadap etnis Uyghur di Xinjiang, Tiongkok menggunakan sistem pengawasan massal berteknologi tinggi. Otoritas setempat melakukan pengumpulan data biometrik, seperti hasil pemindaian iris mata, sampel suara, dan DNA setiap orang di Xinjiang. Selanjutnya, secara berkala, data tersebut dipindai oleh alat pemindai yang dihubungkan dengan kamera CCTV di berbagai fasilitas umum, seperti kereta api, pasar, dan jalan raya untuk mengontrol aktivitas setiap orang di Xinjiang (Greer, 2018). Selain itu, otoritas setempat juga menciptakan suatu sistem *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi, membuat profil, dan melacak semua orang di Xinjiang. Hal ini digunakan layaknya sebuah filter, di mana otoritas setempat menggunakan sistem ini untuk memilih orang-orang dengan perilaku atau karakteristik tertentu yang mereka yakini mengancam keamanan (Human Rights Watch, 2018). Dengan sistem ini, memungkinkan otoritas setempat untuk dapat menerapkan kontrol secara lebih mendalam.

Sejak berlakunya *Strike Hard Campaign*, jumlah etnis Uyghur yang ditangkap secara resmi telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya, menurut angka resmi dan perkiraan sejumlah LSM yang fokus pada isu HAM etnis Uyghur. Pemerintah telah menahan etnis Uyghur di pusat-pusat penahanan praperadilan dan di penjara, yang keduanya merupakan fasilitas formal, serta di kamp-kamp pendidikan politik, yang tidak memiliki dasar hukum. Mereka yang ditahan tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang semestinya. Mereka justru mengalami penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang saat proses penahanan (Human Rights Watch, 2018).

Gambar 2.3 Kondisi Kamp Pendidikan Politik di Xinjiang Tahun 2017



Sumber: *Human Rights Watch*, 'China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslims'

Kamp pendidikan politik di Xinjiang dapat dikatakan merupakan salah satu hal yang paling menyita perhatian komunitas internasional dewasa ini. Meskipun Tiongkok tidak memberikan informasi secara terbuka mengenai jumlah tahanan di kamp-kamp ini, diperkirakan terdapat sekitar satu juta etnis Uyghur yang ditahan di kamp-kamp tersebut. Dalam fasilitas rahasia ini, para tahanan dipaksa untuk menjalani indoktrinasi politik selama jangka waktu yang tidak ditentukan. Merupakan hal biasa untuk menemukan etnis Uyghur – terutama dari kota Hotan dan Kashgar, yang dianggap oleh otoritas setempat sebagai *hotspot* anti-pemerintah – melaporkan bahwa setengah atau lebih dari jumlah anggota keluarga mereka ditangkap oleh otoritas setempat tanpa alasan yang jelas. Sejumlah laporan menyebutkan kematian beberapa orang di kamp-kamp pendidikan politik yang disebabkan oleh kekerasan fisik dan psikologis, kelebihan kapasitas, dan penahanan tanpa batas waktu yang jelas. Meski perawatan medis tersedia, penahanan tetap dilakukan, bahkan ketika para tahanan mengidap penyakit serius. Beberapa di antara mereka bahkan merupakan anak-anak remaja, wanita hamil dan menyusui, lansia, serta penyandang disabilitas. Sejumlah mantan tahanan juga dilaporkan melakukan upaya bunuh diri (Zens, 2018). Hal ini menunjukkan betapa buruknya keadaan di dalam kamp-kamp tersebut.

Dalam menjalani indoktrinasi politik, para tahanan dipaksa untuk mempelajari bahasa Mandarin, menyanyikan lagu-lagu pujian terhadap Partai Komunis Tiongkok, dan menghafalkan aturan-aturan yang berlaku. Bagi penduduk setempat yang berada di luar kamp juga diwajibkan untuk menghadiri upacara pengibaran bendera harian, mengikuti kelas bahasa Mandarin, dan berbagai pertemuan lain dalam rangka indoktrinasi politik. Untuk dapat dikatakan sebagai warga negara Tiongkok yang setia dan terhindar dari hukuman, etnis Uyghur harus memahami lebih dari seribu karakter dalam bahasa Mandarin. Pengawasan yang ketat oleh otoritas setempat tidak hanya berlaku bagi mereka yang berada dalam kamp, melainkan juga bagi mereka yang berada di luar kamp. Baik mereka yang di dalam maupun di luar kamp, tidak diperbolehkan untuk melakukan kontak dengan pihak yang berada di luar negeri (Human Rights Watch, 2018).

Menurut sejumlah laporan yang dihimpun oleh *Human Rights Watch*, pemberlakuan *Strikes Hard Campaign* telah menceraikan banyak anggota keluarga. Hal ini terjadi mana kala beberapa anggota keluarga yang tinggal di luar Tiongkok ditangkap dan dipulangkan secara paksa sehingga meninggalkan anggota keluarga lainnya di luar negeri. Banyak kasus di mana anak-anak terjebak di satu negara tanpa orang tua mereka. Karena adanya larangan bagi etnis Uyghur untuk melakukan kontak dengan pihak yang berada di luar negeri, banyak anggota keluarga yang kehilangan kontak dalam jangka waktu yang lama. Dalam sejumlah kasus lain, beberapa etnis Uyghur justru dipaksa menghubungi anggota keluarganya yang berada di luar negeri untuk menekan mereka agar kembali ke Xinjiang atau untuk mendapatkan informasi rinci tentang kehidupan mereka di luar negeri. Akibatnya, banyak etnis Uyghur yang sekalipun berada di luar negeri senantiasa hidup dalam ketakutan, terutama di negara-negara yang pemerintahannya memiliki ketergantungan besar dengan Tiongkok (Human Rights Watch, 2018).

Pelaksanaan *Strike Hard Campaign* tak hanya berdampak pada hubungan antara pemerintah Tiongkok dengan etnis Uyghur, namun juga hubungan antara pemerintah Tiongkok dengan sejumlah negara lain di dunia. *Strike Hard Campaign* turut berimplikasi terhadap hubungan luar negeri Tiongkok. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengamanan di Xinjiang, pemerintah Tiongkok mewajibkan etnis

Uyghur untuk memutuskan hubungan ke pada setiap orang yang berada di negara yang masuk ke dalam daftar 26 negara sensitif bagi Tiongkok. Ke-26 negara tersebut adalah sebagai berikut: Afghanistan, Algeria, Azerbaijan, Indonesia, Iran, Irak, Kazakhstan, Kenya, Kirgistan, Libya, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Somalia, Sudan Selatan, Suriah, Tajikistan, Thailand, Turki, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Yaman (Ma, 2019). Ke-26 negara tersebut dianggap Tiongkok berpotensi menyebarkan nilai-nilai ekstremisme terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Setiap etnis Uyghur yang kedatangan pernah pergi ke negara-negara tersebut, memiliki keluarga, atau melakukan kontak dengan orang-orang di sana, akan diinterogasi, ditahan, dan bahkan diadili serta dipenjara. Etnis Uyghur juga dilarang menggunakan *WhatsApp* atau aplikasi pengirim pesan lain yang tidak merupakan buatan Tiongkok (Human Rights Watch, 2018).

Menanggapi perlakuan Tiongkok terhadap etnis Uyghur, komunitas internasional tidak tinggal diam. Kritik dan kecaman silih berganti datang bagi Tiongkok. Pada bulan Juli 2019, sebanyak 22 duta besar dari berbagai negara menandatangani sebuah petisi yang mengecam perlakuan Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Petisi tersebut kemudian dikirimkan kepada pimpinan *Human Rights Council*, *Coly Seck*, dan *High Commissioner for Human Rights*, *Michelle Bachelet*. Adapun ke-22 duta besar yang terlibat berasal dari negara-negara sebagai berikut: Australia, Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Inggris, Irlandia, Islandia, Jepang, Jerman, Kanada, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Norwegia, Perancis, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Swiss (New York Times, 2019). Dalam petisi tersebut, ke-22 duta besar mendesak Tiongkok untuk memberikan kebebasan bagi etnis Uyghur. Di kesempatan terpisah, Amerika Serikat turut mengecam perlakuan Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Terkait dengan hal ini, Donald Trump mengancam akan memberikan sanksi terhadap Tiongkok (Kuo, 2018). Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, *Mike Pompeo*, bahkan menggambarkan Tiongkok sebagai negara pelaku pelanggaran HAM terburuk abad ini (TIME, 2019).

Pada 16 November 2019, *The New York Times* merilis 400 dokumen, yang diduga bersumber dari seorang pejabat Partai Komunis Tiongkok yang meminta agar Xi Jinping dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya terhadap etnis

Uyghur. *The New York Times* menyatakan kebocoran itu menunjukkan ketidakpuasan di dalam lingkup internal Partai Komunis Tiongkok terkait dengan serangkaian tindakan represif terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Pejabat anonim yang membocorkan dokumen tersebut melakukannya dengan maksud bahwa pengungkapan ini akan mencegah para petinggi partai, termasuk Xi, lolos dari kesalahannya. Dokumen-dokumen tersebut mengakui bahwa sebagian besar para tahanan sebenarnya tidak melakukan kejahatan dan menyatakan bahwa otoritas setempat harus bersedia mengakui memang tidak ditemukan kejahatan dalam beberapa kasus. Dalam dokumen tersebut juga diketahui bahwa seorang pejabat Partai Komunis Tiongkok bernama Wang Yongzhi dipecat karena dianggap terlalu toleran terhadap etnis Uyghur. Wang diduga terlibat dalam pembebasan 7.000 etnis Uyghur dari sebuah kamp (Ramzy & Buckley, 2019).

2.3 Perjuangan Diaspora Etnis Uyghur

Buruknya perlakuan otoritas Tiongkok terhadap etnis Uyghur membuat sebagian dari mereka berusaha melarikan diri ke negara lain dan meneruskan perjuangan dalam menegakkan keadilan bagi etnisnya dari luar Turkistan Timur. Memasuki dekade 1950-an, kelompok diaspora etnis Uyghur mulai terbentuk di beberapa negara di dunia. Berdasarkan periodenya, gelombang migrasi etnis Uyghur setidaknya dapat dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama dimulai pada awal dekade 1950-an, pasca jatuhnya Turkistan Timur ke tangan Tiongkok yang kemudian ditetapkan sebagai *Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR). Periode kedua terjadi pada pertengahan dekade 1960-an, ketika digencarkannya *Great Leap Forward* oleh Mao Zedong. Periode ketiga dimulai pada akhir dekade 1980-an, bertepatan dengan diberlakukannya *Open Door Policy* oleh Deng Xiaoping (Guang & Debata, 2010).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang diaspora etnis Uyghur yang saat ini tinggal di Belgia bernama Ezer Enver. Perjuangan Enver secara khusus dilatarbelakangi oleh keberadaan ayahnya yang ditahan oleh otoritas Tiongkok. Menurutnya, diaspora etnis Uyghur memiliki peran vital dalam perjuangan ini mengingat Tiongkok menolak kehadiran media massa internasional dan bahkan delegasi negara lain untuk memasuki Xinjiang (Enver,

2020). Untuk itu, diaspora etnis Uyghur merupakan satu-satunya pihak yang dapat menyuarakan mengenai apa yang dialami etnis Uyghur di Xinjiang.

2.3.1 Dinamika Perjuangan Diaspora Etnis Uyghur

Pada periode pertama gelombang migrasi, diaspora etnis Uyghur telah terlibat dalam berbagai kegiatan yang berupaya mentransnasionalisasi isu mengenai tindakan diskriminatif Tiongkok terhadap etnisnya di tanah air. Pada periode ini, perjuangan diaspora etnis Uyghur bertujuan untuk mengakhiri pelanggaran HAM, menghapus diskriminasi terhadap etnis Uyghur di Xinjiang, dan menuntut otonomi wilayah seperti yang dijanjikan. Mehmet Emin Buğra dan İsa Yusuf Alptekin merupakan dua tokoh penting dalam perjuangan awal diaspora etnis Uyghur dari luar tanah air.

Buğra dan Alptekin berperan dalam memimpin migran dari gelombang migrasi pertama etnis Uyghur ke Turki. Adanya kesamaan sejarah membuat Turki dipilih menjadi negara tujuan migran terbesar pada periode ini. Berbasis di Turki, mereka mulai menghimpun dukungan dengan mendirikan organisasi diaspora dan selanjutnya meminta dukungan dari komunitas internasional. Selain itu, mereka juga menerbitkan buku dan majalah, mengadakan pertemuan dengan sejumlah kepala negara untuk meminta bantuan, dan menyelenggarakan sejumlah konferensi untuk mempromosikan perjuangan mereka. Alptekin juga tercatat pernah menghadiri sejumlah forum-forum internasional, antara lain Konferensi Bandung pada tahun 1955, Kongres Dunia Islam pada tahun 1964, dan Konferensi Afro–Asia pada tahun 1965 untuk mempromosikan perjuangan diaspora etnis Uyghur (Shichor, 2003). Meskipun dampaknya belum terlalu signifikan, aktivitas yang dilakukan diaspora etnis Uyghur pada periode pertama ini dinilai penting karena menjadi dasar yang kuat untuk membangun generasi diaspora selanjutnya. Ketika suara etnis Uyghur di tanah air berhasil dibungkam oleh Tiongkok, diaspora etnis Uyghur muncul sebagai harapan untuk meneruskan perjuangan bangsanya.

Perubahan yang signifikan terhadap perjuangan diaspora etnis Uyghur terjadi pada awal dekade 1990-an. Faktor utama yang menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap perjuangan diaspora etnis Uyghur adalah berlakunya *Open Door Policy* oleh Deng Xiaoping pada akhir dekade 1980-an. Pasca kematian Mao Zedong, sejumlah reformasi dilakukan oleh Deng untuk menciptakan kondisi

Tiongkok yang lebih terbuka dengan dunia luar. Alhasil, interaksi yang terjadi antara Tiongkok dengan komunitas internasional pun semakin meningkat. Konsekuensinya, Tiongkok menerima banyak kritik internasional terkait isu domestiknya, termasuk isu mengenai diskriminasi Tiongkok terhadap etnis Uyghur di Xinjiang (Shichor, 2003).

Keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991 juga turut mempengaruhi perjuangan diaspora etnis Uyghur. Kemerdekaan negara-negara Asia Tengah – yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, dan sejarah dengan etnis Uyghur – akibat keruntuhan Uni Soviet memunculkan harapan bagi etnis Uyghur untuk dapat merengkuh kebebasan kembali bagi bangsanya atas Tiongkok. Kemenangan Amerika Serikat dan negara-negara sekutu atas Uni Soviet dalam Perang Dingin juga berdampak pada semakin digaungkannya nilai-nilai Liberalisme dalam forum-forum internasional, salah satunya HAM. Bersamaan dengan semakin terbukanya Tiongkok akibat diberlakukannya *Open Door Policy*, Tiongkok ditetapkan menjadi salah satu negara dengan rekam jejak HAM yang buruk (Shichor, 2003). Buruknya rekam jejak HAM Tiongkok membuat komunitas internasional menaruh perhatian lebih terhadap isu-isu HAM di Tiongkok, salah satunya adalah isu mengenai diskriminasi Tiongkok terhadap etnis Uyghur.

Selain faktor politis, perubahan yang signifikan terhadap perjuangan diaspora etnis Uyghur juga dipengaruhi oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi pada akhir dekade 1980-an. Penemuan internet menyebabkan perubahan revolusioner terhadap pola perjuangan diaspora etnis Uyghur. Internet memungkinkan diaspora etnis Uyghur untuk menjangkau khalayak yang lebih luas sehingga menciptakan kesadaran yang lebih besar dalam komunitas internasional terhadap isu mengenai diskriminasi Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Selain itu, internet juga mempermudah kontak antara diaspora etnis Uyghur di seluruh belahan dunia. Penggunaan *website* telah meningkatkan partisipasi diaspora etnis Uyghur dalam memperjuangkan bangsanya. Dengan ini, perjuangan dapat lebih menyeluruh dan tidak terbatas pada pihak-pihak elit saja. Melalui *website*, penyebaran informasi mengenai apa yang tengah terjadi juga lebih cepat dan mudah (Brinkerhoff, 2006). Hal ini tentunya memunculkan harapan baru bagi perjuangan diaspora etnis Uyghur dalam mencapai tujuan mereka.

Perubahan yang signifikan terhadap perjuangan diaspora etnis Uyghur juga menyebabkan perubahan destinasi negara tujuan migrasi etnis Uyghur. Jika sebelumnya negara-negara Asia Tengah menjadi destinasi utama negara tujuan migrasi etnis Uyghur, memasuki dekade 1990-an, gelombang migrasi berpindah ke negara-negara Eropa. Jerman menjadi negara Eropa yang paling banyak menerima imigran etnis Uyghur pada masa ini. Selain negara-negara Eropa, sejumlah pelajar dan pebisnis juga menjadikan negara-negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia sebagai negara tujuan mereka. Pada tahun 2000, negara-negara Skandinavia mulai menerima pencari suaka yang datang dari Xinjiang (Reyhan, 2012).

Semakin tersebarnya diaspora etnis Uyghur ke seluruh dunia mendorong terbentuknya organisasi-organisasi diaspora etnis Uyghur di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Finlandia, Jepang, Jerman, Inggris, Kanada, Kazakhstan, Kirgistan, Norwegia, Perancis, Swedia, Swiss, dan Turki. Namun demikian, hal ini dinilai kurang efektif bagi perjuangan mereka dalam mencapai tujuan. Perjuangan yang masih bersifat sporadis menyebabkan kurangnya semangat persatuan dan koordinasi di antara diaspora etnis Uyghur di seluruh dunia. Untuk itu, muncul gagasan dari para pemimpin organisasi diaspora etnis Uyghur untuk menyatukan suara mereka (Shichor, 2007). Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah organisasi bernama *East Turkestan National Centre* pada tahun 1998 (Immigration and Refugee Board of Canada, 2020).

Dalam perjalanannya, terdapat perbedaan pendapat di dalam *East Turkestan National Centre* ini yang menyebabkan ketidakselarasan perjuangan. Hal ini menyangkut perbedaan pendekatan dalam mencapai tujuan. Kelompok pertama adalah kelompok garis keras yang mengedepankan cara-cara radikal. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok moderat yang mengedepankan cara-cara demokratis. Kelompok moderat ini yang kemudian bergabung dalam *World Uyghur Youth Congress* yang merupakan cikal bakal dari pembentukan *World Uyghur Congress* (Hidayat, 2013).

2.3.2 World Uyghur Congress

World Uyghur Congress (WUC) dibentuk melalui serangkaian pertemuan yang dilaksanakan pada pertengahan bulan April 2004 di Munich, Jerman. WUC

didirikan dengan tujuan mengupayakan demokrasi, perlindungan HAM, dan kebebasan etnis Uyghur dalam menentukan masa depan politiknya.

Gambar 2.4 Logo World Uyghur Congress



Sumber: *World Uyghur Congress Website*, 'About Us'

WUC bertindak sebagai representatif etnis Uyghur yang ada di tanah air. Hal ini mengingat sulitnya etnis Uyghur yang ada di tanah air untuk berhubungan dengan dunia luar dan menyuarakan mengenai kondisi yang mereka alami di tanah air. Guna mencapai tujuan tersebut, WUC secara berkala mengadakan sidang majelis umum serta menerbitkan laporan tahunan yang dipublikasikan melalui situs resminya. Hingga saat ini, setidaknya WUC telah menyelenggarakan sidang *general assembly* sebanyak enam kali (World Uyghur Congress, 2010)

Dalam *First General Assembly of WUC* yang diselenggarakan pada tahun 2004 di Munich, Jerman, Erkin Alptekin terpilih menjadi Presiden WUC dan Dolkun Isa terpilih menjadi Sekretaris Jenderal WUC. Alptekin adalah mantan Sekretaris Jenderal *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) yang berbasis di Den Haag, Belanda. Alptekin memiliki pengalaman luar biasa dalam bekerja dengan organisasi internasional. Alptekin juga merupakan teman dekat Dalai Lama, tokoh perjuangan rakyat Tibet.

Second General Assembly of WUC kembali diselenggarakan di Munich, Jerman pada bulan November 2006. Dalam pertemuan ini, Rebiya Kadeer terpilih menjadi Presiden WUC menggantikan Erkin Alptekin. Kadeer pernah menjabat sebagai anggota parlemen Tiongkok sebelum akhirnya ditangkap pada tahun 1999 karena menyatakan dukungannya terhadap kebebasan etnis Uyghur. Pada tahun 2005, Kadeer dibebaskan secara bersyarat dan memutuskan pergi ke Amerika Serikat untuk meneruskan perjuangannya mendukung etnis Uyghur.

Third General Assembly of WUC diadakan di Washington DC, Amerika Serikat pada bulan Mei 2009. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dan pengamat dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Jerman, Jepang, Kanada, Kazakhstan, Kirgistan, Norwegia, Perancis, Swedia, dan Turki.

Fourth General Assembly of WUC diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada bulan Mei 2012. Delegasi dan pengamat dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Jerman, Jepang, Kanada, Kazakhstan, Kirgistan, Norwegia, Perancis, Swedia, dan Turki menghadiri pertemuan ini. Rebiya Kadeer kembali terpilih dengan suara bulat sebagai Presiden WUC.

Fifth General Assembly of WUC diselenggarakan di Paris, Perancis pada bulan Juli 2016. Pertemuan dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi WUC dari 18 negara. Agenda pada pertemuan kali ini adalah untuk memilih perwakilan baru, mengamandemen piagam organisasi dan membahas strategi serta rencana advokasi selama empat tahun ke depan.

Sixth General Assembly of WUC diselenggarakan di Munich, Jerman pada bulan November 2017. Pertemuan dihadiri oleh lebih dari 100 delegasi dari 18 negara yang menyetujui penambahan konstitusi dalam WUC serta kelompok kepemimpinan baru yang akan bekerja selama empat berikutnya tahun.

Gambar 2.5 Sixth General Assembly of WUC



Sumber: *World Uyghur Congress Website*, 'World Uyghur Congress Sixth General Assembly'

Komunitas internasional merupakan sasaran utama perjuangan WUC. Hal ini dapat dipahami mengingat Tiongkok enggan mengakui WUC sebagai organisasi yang legal. Secara rasional, WUC pun tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat berhadapan langsung secara *head-to-head* dengan Tiongkok. Untuk itu, WUC berupaya mencari dukungan dari komunitas internasional dengan melakukan lobi kepada para pembuat kebijakan. Pada bulan Juni 2007, salah satu petinggi WUC, Rebiya Kadeer melakukan pertemuan dengan Presiden George Bush untuk menyampaikan perjuangan WUC di Amerika Serikat. Pada Oktober di tahun yang sama, Kadeer juga melakukan pertemuan dengan *British Foreign and Commonwealth Office*. Dalam kurun waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, perwakilan WUC telah melakukan kunjungan ke setidaknya 25 negara, termasuk Amerika Serikat, Albania, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Bosnia, Ceko, Denmark, Estonia, Filipina, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kazhakhstan, Kanada, Kirgistan, Perancis, Norwegia, Polandia, Swedia, Swiss, Turki, dan Ukraina (Hidayat, 2013).

WUC juga berpartisipasi secara aktif dalam sejumlah organisasi internasional, salah satunya Dewan HAM PBB. WUC secara berkala menyampaikan laporan, baik secara tertulis maupun lisan di berbagai forum yang diadakan Dewan HAM PBB, seperti dalam *UN Forum on Minority Issues* (World Uyghur Congress, 2010). Selain Dewan HAM PBB, WUC juga ikut serta dalam sejumlah organisasi internasional lain, seperti *Unrepresented Nations and People Organization* (UNPO), *Human Rights in China* (HRIC), *Human Rights Watch* (HRW), dan *Minority Rights Group* (MRG) (Hidayat, 2013). Untuk mempermudah mobilitas, WUC menempatkan kantor representatifnya di sejumlah negara, antara lain Australia, Belgia, Denmark, Inggris, Jepang, Kirgistan, Perancis, dan Swedia (World Uyghur Congress, 2010). Harapannya, upaya ini dapat memberi tekanan terhadap Tiongkok agar mengubah kebijakannya terhadap etnis Uyghur.

Ketika kiprahnya mulai dikenal komunitas internasional, WUC memberanikan diri untuk lebih terbuka dalam menyuarakan perjuangannya. Pada 15 Maret 2018, ribuan diaspora etnis Uyghur melakukan demonstrasi di 15 kota di 14 negara – Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Finlandia, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, Perancis, Norwegia, Swedia, dan Turki – bertajuk *One Voice One*

Step. Aksi ini berhasil menyita perhatian dunia mengenai tindakan represif yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uyghur (World Uyghur Congress, 2018). Pada 27 April 2018, lebih dari 2.000 diaspora etnis Uyghur dari seluruh dunia berkumpul di Brussels, Belgia, untuk kembali melakukan demonstrasi. Kali ini, demonstrasi secara khusus menuntut Uni Eropa bersuara menanggapi tindakan represif Tiongkok terhadap etnis Uyghur. Aksi ini mendapat dukungan dari UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization, 2018).